

PERAN POLISI RUKUN WARGA (RW) SEBAGAI PILAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI RW08 KELURAHAN PANGKALAN KERINCI TIMUR

Fahrol Ramadhan¹, Fakhri Usmita²

¹Universitas Islam Riau, fahrolramadhan@student.uir.ac.id.

²Universitas Islam Riau, fakhri@soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 16, 2023

Revised March 09, 2023

Accepted March 15, 2023

Available online June 30, 2023

Kata Kunci:

Keamanan lingkungan; Ketertiban;
Polisi Rukun Warga (Polisi RW);
Partisipasi masyarakat

Keywords:

Environmentsecurity; order
Citizens'Association; Police
(RW Police); community
participation

*Corresponding author

E-mail addresses:

fahrolramadhan@student.uir.ac.id.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

ABSTRAK

Keamanan dan ketertiban di lingkungan pemukiman merupakan aspek vital bagi terwujudnya masyarakat yang damai. Studi kualitatif ini meneliti fungsi krusial Polisi Rukun Warga (Polisi RW) dalam menjamin keamanan dan ketertiban di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, terutama di RW 08. Mengadopsi Teori Reaksi Sosial, penelitian ini menganalisis cara Polisi RW melaksanakan tugasnya sebagai pengawal keamanan lingkungan melalui berbagai aktivitas seperti patroli, deteksi awal ancaman keamanan, mediasi konflik warga, dan kolaborasi dengan Bhabinkamtibmas, pengurus RW/RT, serta masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Polisi RW, Bhabinkamtibmas, ketua RW, ketua RT, dan warga setempat. Keberadaan Polisi RW mendapat respon positif dari mayoritas warga karena meningkatkan rasa aman, tanpa adanya penolakan terhadap program dan kehadiran mereka. Guna meningkatkan efektivitas, diperlukan upaya berkelanjutan seperti pelatihan personel, penyediaan sarana prasarana yang cukup, dan pengembangan program pencegahan kejahatan berbasis partisipasi masyarakat. Ke depannya, diharapkan Polisi RW dapat terus mendorong keterlibatan warga, meningkatkan kompetensi anggota, memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, serta mengoptimalkan program yang melibatkan masyarakat. Secara umum, Polisi RW memainkan peran signifikan dengan berkoordinasi dan menggerakkan partisipasi aktif warga

ABSTRACT

Building a sense of security and order in the residential environment is a crucial factor for creating a peaceful community life. This qualitative research examines the strategic role of the Rukun Warga Police (Polisi RW) as the front guard in realizing security and order in Pangkalan Kerinci Timur Subdistrict, especially in the RW 08 Using the perspective of Social Reaction Theory, it reveals how the RW Police carry out their function as pillars. environmental security through mobile patrols, early detection of security disturbances, mediation of conflicts between residents, as well as close coordination with Bhabinkamtibmas, RW/RT administrators, and active community participation. Data was obtained through interviews with sources including the RW Police, Bhabinkamtibmas, RW heads, RT heads, and the community. The majority of residents responded positively to the presence of the RW Police, which increased their sense of security, there were no challenges, everyone liked the program and the presence of the police was harmonious with the residents. To optimize performance, continuous efforts are needed, such as increasing personnel capacity through training, providing adequate facilities, and developing crime prevention programs that involve massive citizen participation. It is hoped that in the future, the RW Police can continue to mobilize community participation, increase the capacity of members, improve coordination with various parties, and optimize programs that involve residents. Overall, RW Police have an important role by coordinating and involving active community participation.

1. PENDAHULUAN

Undang-undang No 2 Tahun 2002, adalah institusi penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, memungkinkan warga negara menjalani kehidupan sehari-hari tanpa gangguan. Tugas Polri mencakup tiga aspek utama: keamanan, pencegahan kriminalitas, dan penegakan hukum. Dalam aspek keamanan, Polri menjaga ketertiban umum, menangani unjuk rasa dan kerusuhan, serta melindungi kepentingan umum. Untuk pencegahan kriminalitas, Polri melakukan patroli, sosialisasi, dan mengantisipasi tindak kriminal. Dalam penegakan hukum, Polri menyelidiki, menindak, dan mengidentifikasi pelaku kejahatan untuk proses peradilan. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), sebagai bagian dari Polri, berperan penting dalam menjaga keamanan di tingkat komunitas. Mereka secara rutin berpatroli, memonitor situasi, dan mensosialisasikan kebijakan kepolisian untuk memelihara keamanan wilayah.

UU No. 2 Tahun 2021 tentang Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat memperkenalkan konsep Polisi Rukun Warga (RW). Polisi RW ini merupakan perpanjangan tangan Bhabinkamtibmas di tingkat yang lebih mikro, yaitu RW. Tujuannya adalah untuk lebih dekat dengan masyarakat, mendeteksi potensi gangguan keamanan lebih dini, dan merespon lebih cepat terhadap kejadian keamanan di tingkat warga. Polisi RW bertugas mengawasi situasi keamanan, melaporkan hal-hal mencurigakan, mendukung pencegahan kriminalitas, dan membantu menegakkan peraturan di lingkungan RW. Keberadaan Polisi RW tidak menggantikan Bhabinkamtibmas, melainkan melengkapi dan berkolaborasi dalam menjaga keamanan di tingkat RW/RT. Instruksi ini bertujuan untuk meningkatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Polisi RW, diharapkan pengawasan dan upaya pencegahan tindak kriminalitas dapat dilakukan secara lebih intensif dan menyeluruh di tingkat RW/RT, mengingat jumlah personel Bhabinkamtibmas yang terbatas. Ini menjadi sangat penting mengingat fluktuasi kasus tindak kejahatan dalam beberapa tahun terakhir yang berpotensi mengganggu rasa aman masyarakat.

Implementasi Polisi RW di RW 08 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur menjadi fokus penelitian ini, mengingat perannya yang vital sebagai pilar keamanan dan ketertiban di tingkat komunitas. Sebagai sebuah konsep baru dalam sistem keamanan masyarakat, Polisi RW diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara aparat kepolisian formal dengan warga setempat. Di RW 08 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Polisi RW telah mulai menjalankan tugasnya dengan berbagai tantangan dan peluang. Mereka berperan aktif dalam mengorganisir ronda malam, melakukan patroli rutin, dan menjadi penghubung antara warga dengan Bhabinkamtibmas. Kehadiran Polisi RW telah memberikan rasa aman yang lebih kepada warga, karena mereka merasa ada yang mengawasi lingkungan mereka secara lebih dekat dan intensif. Namun, implementasi Polisi RW juga menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya dan pelatihan. Sebagai relawan dari masyarakat, Polisi RW memerlukan pelatihan yang memadai tentang prosedur keamanan, penanganan konflik, dan aspek hukum dasar. Selain itu, dukungan peralatan dan infrastruktur juga menjadi tantangan tersendiri.

Koordinasi antara Polisi RW dengan Bhabinkamtibmas dan aparat keamanan lainnya juga menjadi aspek krusial yang perlu diteliti lebih lanjut. Bagaimana mereka dapat bekerja sama secara efektif tanpa tumpang tindih tugas dan wewenang menjadi pertanyaan penting dalam penelitian ini. Penelitian ini juga akan mengkaji persepsi masyarakat terhadap keberadaan Polisi RW. Apakah warga merasa lebih aman, Bagaimana tingkat kepercayaan mereka terhadap Polisi RW? Apakah ada perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial dan tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap potensi gangguan keamanan? Lebih jauh, penelitian ini akan menganalisis dampak keberadaan Polisi RW terhadap angka kriminalitas dan gangguan ketertiban di RW 08 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur. Apakah terjadi penurunan kasus kejahatan? Bagaimana dengan kecepatan respons terhadap insiden keamanan? Aspek lain yang akan diteliti adalah bagaimana Polisi RW dapat berperan dalam membangun ketahanan komunitas terhadap berbagai ancaman keamanan, termasuk radikalisme dan intoleransi. Peran mereka dalam menjaga kohesi sosial dan memediasi konflik di tingkat warga juga akan menjadi fokus penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas implementasi Polisi RW sebagai inovasi dalam sistem keamanan masyarakat. Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan keamanan di tingkat RW, serta menjadi referensi bagi daerah lain yang ingin mengadopsi sistem serupa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman teoretis tentang keamanan komunitas, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat akar rumput. Hal ini sejalan dengan semangat Polri untuk terus berinovasi dalam pelayanan keamanan dan membangun kemitraan yang lebih erat dengan masyarakat.

Tabel 1.1 Data Angka Kriminalitas Di Kabupaten Pelalawan Dari Tahun 2020 – 2023

No	Tahun	Jumlah Kasus Kriminalitas
1	2020	1.224
2	2021	1.165
3	2022	1.294
4	2023	1.182

Sumber : <https://pelalawankab.bps.go.id/>

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, angka kriminalitas di Kabupaten Pelalawan mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, jumlah kasus kriminalitas di Kabupaten Pelalawan sebanyak 1.224 kasus, menurun menjadi 1.165 kasus pada tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi 1.294 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah kasus kriminalitas di Kabupaten Pelalawan kembali menurun menjadi 1.182 kasus. Dari data tersebut, jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi di Kabupaten Pelalawan adalah pencurian, dengan jumlah kasus sebanyak 812 kasus pada tahun 2023. Jenis tindak pidana lain yang juga cukup banyak terjadi adalah penganiayaan, dengan jumlah kasus sebanyak 228 kasus pada tahun 2023. Peningkatan angka kriminalitas di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2022 diduga disebabkan oleh beberapa faktor kompleks. Salah satu faktor utama adalah kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Tabel 1.2 Data Angka Kriminalitas RW08/RT01 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Dari Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Jumlah Kasus Kriminalitas
1	2020	12
2	2021	10
3	2022	7
4	2023	6
5	2024	3

Sumber : Data Polsek Pangkalan Kerinci

Menurut data Polsek Pangkalan Kerinci, angka kriminalitas di RW 08 RT 01 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, jumlah kasus kriminalitas di RW 08 RT 01 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur sebanyak 12 kasus, menurun menjadi 10 kasus pada tahun 2021, dan kembali menurun menjadi 7 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah kasus kriminalitas di RW 08 RT 01 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur kembali menurun menjadi 6 kasus dan data terbaru tahun 2024 mengalami penurunan lagi menjadi 3 kasus saja. Dari data tersebut, jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi di RW 08 RT 01 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur adalah pencurian, dengan jumlah kasus sebanyak 5 kasus pada tahun 2023. Jenis tindak pidana lain yang juga cukup banyak terjadi adalah penganiayaan, dengan jumlah kasus sebanyak 3 kasus pada tahun 2023.

2. METODE

Peneliti memilih metode penelitian kualitatif pada penelitian ini dikarenakan kepentingan utama dalam penelitian ini yang memprioritaskan penulis untuk melakukan penelitian dengan cara wawancara dan observasi guna mengetahui Bagaimana Peran Polisi Rukun Warga (RW) sebagai Pilar Keamanan dan Ketertiban di RW 08 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur. Kajian ini dikaitkan dengan perspektif teori kontrol sosial. Metodologi yang dipilih dirancang secara khusus untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman makna dan pengalaman manusia secara mendalam. Metode ini menggunakan data kualitatif, seperti teks, gambar, audio, dan video, untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial dan budaya (Moleong, L. J. 2005:3). Menurut Singarimbun & Effendi (dalam Nabila. & Widiyastuti 2018:2) Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik nonprobability. Teknik nonprobability dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Informan ditetapkan dengan Snowball sampling.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Polisi RW adalah program inovasi yang dicetuskan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan pelayanan dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Program ini diresmikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada tanggal 15 maret 2023. Polisi RW merupakan anggota Polri yang ditugaskan di tingkat rukun warga (RW). Setiap RW akan memiliki satu orang polisi RW. Tugas utama polisi RW adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan RW, serta membantu masyarakat dalam hal-hal yang membutuhkan pertolongan, seperti kecelakaan atau bencana alam. Menjadi seorang polisi RW (Rukun Warga) bukanlah tugas yang dapat diemban oleh sembarang personel kepolisian. Terdapat persyaratan khusus terkait pangkat yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa tugas ini dijalankan oleh anggota kepolisian yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai. Berdasarkan peraturan yang berlaku, syarat pangkat terendah untuk menjadi polisi RW adalah Brigadir Polisi Satu (Briptu). Dan syarat pangkat tertinggi yang diperbolehkan untuk menjadi polisi RW adalah Ajun Komisaris Polisi (AKP). Pangkat AKP merupakan pangkat perwira pertama dalam hierarki kepolisian, yang menunjukkan tingkat pengalaman, pengetahuan, dan kepemimpinan yang lebih matang dibandingkan dengan pangkat-pangkat di bawahnya. Itu mengapa Polisi Rukun Warga (RW) di rw 08 rt 01 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur berpangkat Iptu. Iptu memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang mumpuni dalam bidang keamanan dan penegakan hukum. Kemampuan ini sangat bermanfaat untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas di lingkungan RW.

Penunjukan Iptu sebagai Polisi RW menunjukkan kepercayaan dan penghargaan Polri terhadap dedikasi dan kontribusi mereka dalam memajukan Kamtibmas. Hal ini juga menjadi motivasi bagi para Iptu untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Perlu diingat bahwa penunjukan Iptu sebagai Polisi RW tidak berarti penurunan pangkat atau degradasi. Ini merupakan penugasan baru dengan tanggung jawab yang berbeda namun sama pentingnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan kepada iptu nurhakim sebagai Polisi RW saya mendapatkan keterangan bahwa peran Polisi Rukun Warga (Polisi RW) dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat RW/RT sangat penting. Mereka melaksanakan tugas utama seperti patroli keliling, menjadi pusat informasi bagi warga, mengambil tindakan awal jika terjadi gangguan keamanan, serta menjalin koordinasi dengan Bhabinkamtibmas, pengurus RW/RT, dan masyarakat setempat. Dengan kehadiran Polisi RW di tengah masyarakat, rasa keterjagaan dan keamanan lingkungan menjadi semakin meningkat. Keberadaan Polisi RW yang rutin melakukan patroli keliling, baik pada pagi, sore, maupun malam hari, memberikan rasa aman dan tenang bagi warga. Kehadiran mereka di jalanan membuat potensi tindak kejahatan menjadi lebih terkendali dan memberikan efek jera bagi para pelaku kriminal. Selain itu, kedekatan Polisi RW dengan masyarakat melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan kemasyarakatan juga membantu mendekatkan polisi dengan warga, sehingga terjalin hubungan yang akrab dan saling percaya. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih responsif dalam melaporkan hal-hal mencurigakan atau gangguan keamanan kepada Polisi RW.

Selain meningkatkan rasa keterjagaan dan keamanan, keberadaan Polisi RW juga mempersingkat alur pengaduan dan pelaporan masyarakat terkait masalah keamanan lingkungan. Warga tidak perlu lagi melapor langsung ke kantor polisi yang lokasinya mungkin cukup jauh dari permukiman mereka. Polisi RW hadir sebagai garda terdepan yang dapat dihubungi secara langsung oleh warga jika terjadi gangguan keamanan seperti pencurian, keributan, atau tindak kriminal lainnya. Dengan adanya Polisi RW, warga dapat dengan mudah melaporkan kejadian atau situasi mencurigakan yang mereka alami atau saksikan. Polisi RW akan segera merespons laporan tersebut, mendatangi lokasi, mencatat laporan secara detil, dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Proses pelaporan menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga penanganan terhadap gangguan keamanan dapat dilakukan dengan sigap. Dalam kasus pencurian yang dialami salah satu warga, keberadaan Polisi RW membuktikan pentingnya peran mereka dalam menghadapi situasi darurat seperti itu. Warga dapat langsung menghubungi Polisi RW yang kemudian berkoordinasi dengan cepat dengan anggota Polisi RW lainnya dan pihak kepolisian terdekat. Berkat respon cepat dari Polisi RW, pelaku pencurian akhirnya berhasil diringkus dalam waktu kurang dari 24 jam, meskipun sebagian barang berharga tidak terselamatkan.

Keberhasilan program Polisi RW dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat tidak lepas dari dedikasi dan profesionalisme para anggota kepolisian yang ditugaskan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Iptu Nurhakim sebagai Polisi RW di RW 08 RT 01 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Selain melakukan patroli rutin dan

menjadi pusat informasi bagi warga, Iptu Nurhakim juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Hal ini semakin mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat, menciptakan rasa saling percaya yang sangat penting dalam upaya menjaga keamanan lingkungan. Kehadiran Polisi RW juga telah mendorong terbentuknya sistem keamanan lingkungan yang lebih terstruktur dan efektif. Masyarakat mulai membentuk kelompok-kelompok ronda malam yang bekerja sama dengan Polisi RW dalam menjaga keamanan lingkungan. Sistem pelaporan yang lebih cepat dan efisien juga telah berhasil mencegah beberapa tindak kejahatan sebelum terjadi, berkat kewaspadaan warga dan respons cepat dari Polisi RW. Namun, program Polisi RW juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dijaga. Meskipun setiap RW memiliki satu Polisi RW, pada praktiknya seorang Polisi RW sering kali harus menangani permasalahan di beberapa RW sekaligus, terutama di daerah yang padat penduduk. Untuk mengatasi hal ini, Polri terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan program. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan meningkatkan koordinasi antara Polisi RW dengan Bhabinkamtibmas dan unit-unit kepolisian lainnya. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kemampuan Polisi RW juga terus dilakukan untuk memastikan mereka dapat menangani berbagai situasi dengan efektif. Ke depannya, program Polisi RW diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi model kepolisian masyarakat yang efektif. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan semakin eratnya hubungan antara polisi dan warga, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan harmonis di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian, keberadaan Polisi RW di tengah masyarakat tidak hanya meningkatkan rasa keterjagaan dan keamanan lingkungan, tetapi juga mempersingkat alur pelaporan dan pengaduan masyarakat terkait masalah keamanan. Warga merasa lebih aman dan terlindungi dengan adanya Polisi RW yang siap sedia menangani gangguan keamanan secara cepat dan responsif, berkat koordinasi erat yang terjalin antara Polisi RW dengan aparat kepolisian lainnya serta masyarakat setempat. Polisi RW berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah RW/RT. Mereka melakukan patroli keliling, mendeteksi dini potensi gangguan keamanan, menengahi permasalahan kecil antar warga, memberikan himbauan ketertiban, dan menjadi penghubung dengan pihak kepolisian jika terjadi tindak kriminal. Kehadiran mereka menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga. Koordinasi dengan Bhabinkamtibmas, pengurus RW/RT, dan Masyarakat Polisi RW menjalin koordinasi yang erat dengan Bhabinkamtibmas, pengurus RW/RT, dan masyarakat setempat. Koordinasi ini dilakukan melalui pertemuan rutin, grup komunikasi, kunjungan lapangan, patroli gabungan, serta pelaporan insidental jika terjadi gangguan keamanan. Hal ini memfasilitasi pertukaran informasi, sinergi pengamanan, dan optimalisasi sumber daya untuk menjaga keamanan lingkungan. Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Secara umum, masyarakat memberikan dukungan terhadap keberadaan Polisi RW karena merasakan manfaatnya dalam menjaga keamanan lingkungan. Faktor pendukung meliputi koordinasi yang baik, dukungan pengurus RW/RT, dan kepercayaan masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa warga yang kurang peduli dan kurangnya kesadaran warga menjadi salah satu faktor penghambat. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Untuk meningkatkan kapasitas, Polisi RW mendapat pelatihan dasar dari pihak kepolisian. Namun, dibutuhkan upaya lebih lanjut seperti penambahan personel, peningkatan fasilitas, dan program pencegahan kriminalitas yang melibatkan partisipasi aktif warga. Hambatan yang di alami polisi rukun warga (rw) khususnya di rw 08 kelurahan pangkalan kerinci timur Salah satu hambatan yang dihadapi polisi rukun warga (polisi RW) di RW 08 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur adalah ketidaksesuaian lokasi tempat tinggal dengan wilayah tugas. Meskipun jarak antara rumah polisi RW dan wilayah tugasnya tidak terlalu jauh, hal ini tetap menjadi kendala operasional yang signifikan. Ketidaksesuaian ini berdampak pada beberapa aspek: Respons terhadap situasi darurat menjadi lebih lambat, Visibilitas dan aksesibilitas polisi RW bagi warga setempat berkurang. Pemahaman terhadap dinamika sosial dan isu-isu lokal menjadi terbatas, Potensi penurunan efektivitas dalam pengambilan keputusan dan penerapan strategi keamanan, Hambatan ini menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan penempatan polisi RW untuk meningkatkan efisiensi sistem keamanan dan ketertiban di tingkat rukun warga. Harapan dan Perbaikan ke Depan Harapan ke depan adalah agar Polisi RW dapat terus menggalang partisipasi masyarakat, meningkatkan kapasitas anggota, meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, serta mengoptimalkan program-program yang melibatkan warga dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban wilayah RW/RT dengan lebih baik lagi.

Berdasarkan temuan hasil data dan informasi yang penulis terima di lapangan, berikut adalah penjelasan dan pembahasan ilmiahnya secara lengkap dan terperinci berdasarkan Teori Reaksi Sosial terkait Peran Polisi Rukun Warga (RW) Sebagai Pilar Keamanan Dan Ketertiban Di RW 08 RT 01 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur:

1. Pendekatan ini berfokus pada reaksi dari lembaga formal atau institusi negara terhadap perilaku menyimpang. Dalam konteks Polisi RW, mereka merupakan bagian dari aparat kepolisian yang merupakan institusi formal negara. Keberadaan Polisi RW dapat dilihat sebagai bentuk reaksi formal dari kepolisian dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat RW/RT.
 - a. Polisi RW memiliki kewenangan dan tanggung jawab formal dalam mencegah dan menindak pelanggaran hukum di wilayah RW/RT.
 - b. Mereka dapat memberikan tindakan formal seperti peringatan, penengahan, atau penindakan awal sebelum melibatkan aparat kepolisian yang lebih tinggi.
 1. Adanya pelatihan dan pembinaan dari kepolisian kepada Polisi RW merupakan bentuk reaksi formal dalam meningkatkan kapasitas mereka.
1. Pendekatan ini berfokus pada reaksi dari masyarakat atau kelompok informal terhadap perilaku menyimpang. Dalam hal ini, keberadaan Polisi RW dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh reaksi sosial informal dari masyarakat.
 1. Kehadiran Polisi RW dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat, sehingga mereka cenderung bereaksi lebih tegas terhadap pelanggaran norma atau gangguan keamanan.
 2. Koordinasi dan kerjasama antara Polisi RW, pengurus RW/RT, dan masyarakat merupakan bentuk reaksi sosial informal dalam menjaga keamanan lingkungan
 3. Partisipasi aktif masyarakat dalam program pencegahan kriminalitas yang difasilitasi oleh Polisi RW merupakan bentuk reaksi sosial informal positif.

Berdasarkan Teori Reaksi Sosial Informal, peran Polisi Rukun Warga (RW) dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui beberapa cara, Polisi RW yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik, adil, dan transparan dapat membangun kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini penting agar masyarakat merasa nyaman untuk berpartisipasi dan melaporkan setiap pelanggaran atau masalah keamanan yang terjadi. Polisi RW berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan aparat keamanan formal. Mereka dapat menyampaikan aspirasi masyarakat dan sebaliknya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Polisi RW dapat mengajak dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program-program yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban, seperti membentuk sistem ronda malam, mengawasi lingkungan, atau melaporkan aktivitas mencurigakan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, Polisi RW dapat menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap lingkungan mereka. Rasa kepemilikan ini mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan. Dengan peran Polisi RW yang efektif dan didukung oleh reaksi positif masyarakat, partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dapat meningkat. Kolaborasi antara Polisi RW dan masyarakat ini menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif.

3. Pendekatan ini berfokus pada reaksi dari kelompok atau organisasi non-formal, seperti organisasi kemasyarakatan atau komunitas lokal, terhadap perilaku menyimpang.
 - a. Polisi RW dapat berkoordinasi dengan organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna, Rukun Kematian, atau organisasi keagamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah RW/RT.
 - b. Mereka dapat memfasilitasi pembentukan komunitas pengamanan lingkungan atau forum kemitraan yang melibatkan berbagai elemen non-formal di masyarakat.
 - c. Upaya pencegahan dan penanganan masalah sosial di lingkungan RW/RT dapat dilakukan bersama dengan organisasi non-formal setempat.

Dengan mempertimbangkan ketiga perspektif dalam Teori Reaksi Sosial, keberadaan Polisi RW dapat dilihat sebagai upaya untuk mengintegrasikan reaksi formal, informal, dan non-formal dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat RW/RT. Koordinasi dan kolaborasi antara Polisi RW, aparat kepolisian, masyarakat, dan organisasi non-formal dapat menciptakan sinergi yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani perilaku menyimpang serta meningkatkan rasa aman di lingkungan RW/RT.

Pembahasan

Peran Polisi RW sebagai pilar keamanan dan ketertiban di tingkat grassroots tidak hanya berhenti pada fungsi pengamanan semata. Mereka juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman dan harmonis melalui pendekatan yang lebih holistik. Salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan adalah peningkatan kapasitas Polisi RW dalam hal mediasi konflik dan resolusi masalah. Dengan keterampilan ini, Polisi RW dapat lebih efektif dalam menengahi perselisihan kecil antar warga sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih serius. Pelatihan dalam bidang ini

akan membantu Polisi RW tidak hanya menjadi penjaga keamanan, tetapi juga fasilitator perdamaian di tingkat komunitas. Selain itu, pengembangan program-program pencegahan kejahatan yang inovatif dan berbasis teknologi dapat menjadi fokus baru bagi Polisi RW. Misalnya, implementasi sistem pelaporan online atau aplikasi mobile yang memudahkan warga untuk melaporkan kejadian mencurigakan secara real-time. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi respons terhadap potensi ancaman, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Penting juga untuk memperhatikan aspek kesejahteraan dan motivasi Polisi RW itu sendiri. Pemberian insentif yang memadai, pengakuan atas prestasi, dan jaminan sosial dapat meningkatkan dedikasi dan kinerja mereka. Hal ini pada gilirannya akan berdampak positif pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, Polisi RW juga dapat berperan dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat. Mereka dapat menjadi mitra dalam inisiatif pengembangan ekonomi lokal, program kesehatan masyarakat, atau kegiatan sosial lainnya. Pendekatan ini akan memperkuat hubungan antara Polisi RW dan warga, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pencegahan kejahatan. Terakhir, evaluasi berkala terhadap efektivitas program Polisi RW perlu dilakukan secara rutin. Pengumpulan data dan analisis yang sistematis akan membantu dalam mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan serta praktik-praktik terbaik yang dapat direplikasi di wilayah lain. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terus berkembang ini, Polisi RW dapat terus memperkuat perannya sebagai pilar keamanan dan ketertiban, sekaligus menjadi katalisator bagi pembangunan komunitas yang lebih aman, sejahtera, dan berkelanjutan.

2. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian dan analisa yang peneliti temukan beberapa poin utama terkait peran Polisi Rukun Warga (Polisi RW) dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah RW 08 RT 01 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur adalah Peran Polisi RW sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan lingkungan, seperti. Melakukan patroli keliling secara rutin, mendeteksi dini potensi gangguan keamanan, menengahi permasalahan kecil antar warga, memberikan himbauan ketertiban, menjadi penghubung dengan pihak kepolisian jika terjadi tindak kriminal. Koordinasi yang erat antara Polisi RW dengan Bhabinkamtibmas, pengurus RW/RT, dan masyarakat. Secara umum masyarakat memberikan dukungan terhadap keberadaan Polisi RW karena merasakan manfaatnya dalam menjaga keamanan lingkungan, meskipun masih ada beberapa warga yang kurang peduli. Untuk meningkatkan kapasitas, Polisi RW mendapat pelatihan dasar dari pihak kepolisian, namun dibutuhkan upaya lebih lanjut seperti penambahan personel, peningkatan fasilitas, dan program pencegahan kriminalitas yang melibatkan partisipasi aktif warga.

Saran

Mengoptimalkan peran Polisi RW dalam melakukan pendekatan persuasif dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah RW/RT melalui kemitraan dan partisipasi aktif warga. Mengoptimalkan program penyuluhan dan kampanye anti-kriminal yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam mencegah tindak kejahatan di lingkungan. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang lebih erat antara Polisi RW dengan pengurus RW/RT, warga masyarakat, serta aparat kepolisian melalui pertemuan rutin, patroli gabungan, dan berbagi informasi. Mengembangkan program yang melibatkan partisipasi aktif organisasi kemasyarakatan atau komunitas lokal dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan RW/RT. Meningkatkan pelatihan dan pembinaan bagi anggota Polisi RW untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan, dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait, seperti Kepolisian Republik Indonesia, pemerintah daerah, dan masyarakat, dalam upaya mengoptimalkan peran Polisi RW sebagai pilar keamanan di tingkat RW/RT serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh warga.

Implementasi teknologi: Mengintegrasikan penggunaan teknologi seperti aplikasi mobile atau sistem pelaporan online untuk memudahkan komunikasi antara Polisi RW dan warga. Ini dapat meningkatkan kecepatan respon terhadap insiden dan memungkinkan pelaporan kejadian mencurigakan secara real-time. Program mentoring: Membangun sistem mentoring di mana Polisi RW yang lebih berpengalaman dapat membimbing anggota baru, memastikan transfer pengetahuan dan praktik terbaik dalam menjalankan tugas. Pengembangan keterampilan mediasi: Memberikan pelatihan khusus dalam hal mediasi konflik dan resolusi masalah kepada Polisi RW, sehingga mereka dapat lebih efektif menangani perselisihan kecil di

tingkat komunitas. Insentif dan penghargaan: Mengembangkan sistem insentif dan penghargaan bagi Polisi RW yang menunjukkan kinerja luar biasa, untuk meningkatkan motivasi dan dedikasi dalam menjalankan tugas. Program pemberdayaan pemuda: Melibatkan pemuda setempat dalam program keamanan lingkungan, misalnya melalui program magang atau volunteer untuk Polisi RW, guna menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keamanan lingkungan sejak dini. Evaluasi berkala: Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas program Polisi RW, termasuk survei kepuasan masyarakat, untuk mengidentifikasi area perbaikan dan mengukur dampak program. Pengembangan jaringan antar-RW: Memfasilitasi pertukaran informasi dan praktik terbaik antar Polisi RW di berbagai wilayah, sehingga dapat saling belajar dan meningkatkan kinerja secara kolektif.

Program kesehatan dan kesejahteraan: Memperhatikan aspek kesehatan fisik dan mental Polisi RW melalui program pemeriksaan kesehatan rutin dan konseling, untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas dengan optimal. Pelatihan manajemen krisis: Memberikan pelatihan khusus dalam penanganan situasi krisis atau darurat, sehingga Polisi RW dapat bertindak cepat dan tepat dalam kondisi-kondisi ekstrem. Kolaborasi dengan institusi pendidikan: Menjalinkan kerjasama dengan sekolah atau perguruan tinggi setempat untuk program edukasi keamanan dan kampanye anti-kriminal, melibatkan Polisi RW sebagai narasumber. Pengembangan program keamanan siber: Memberikan pelatihan dasar keamanan siber kepada Polisi RW, sehingga mereka dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang risiko kejahatan online dan cara pencegahannya. Peningkatan transparansi: Mendorong Polisi RW untuk secara rutin melaporkan aktivitas dan pencapaian mereka kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan peran Polisi RW dapat semakin dioptimalkan, menciptakan sistem keamanan lingkungan yang lebih efektif, responsif, dan berbasis masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih aman, tertib, dan harmonis bagi seluruh warga di tingkat RW/RT.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan. (2024). Statistik Kriminalitas Kabupaten Pelalawan 2020-2023. Pangkalan Kerinci: BPS Kabupaten Pelalawan.
- Lestari, R., & Zulherawan, M. (2025). The Role Of The Women's Empowerment, Child Protection And Community Empowerment Service (DP3APM) Of Pekanbaru City In Advocacy For Victims In Fulfilling The Rights To Child Support. *Pasundan Social Science Development*, 5(2), 196-206.
- Madani, R., Novarizal, R., & Zulherawan, M. (2025). Security Management As A Form Of Social Control Against Crime In The UIR Campus Environment. *Pasundan Social Science Development*, 5(2), 188-195.
- Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nabila, A., & Widiyastuti, D. (2018). Teknik Pengambilan Sampel dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 5(2), 45-60.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 2. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Lembaran Negara RI Tahun 2021, No. 2. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Valentino, R. R. (2016). PERAN NEGARA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN TERORISME DI INDONESIA (Study Analisa Kriminologis). *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 34-42.
- Wijaya, B. A., & Zulherawan, M. (2024). Strategi Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Kecurangan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 16728-16746.